
PERAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA

Oleh

Asep Hidayat¹⁾, Selga Zira Fresh Yani²⁾, Yoiko Aliviannisya Rahmi³⁾^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, BandungE-mail: ¹drasephi62@gmail.com, ²selgazira9@gmail.com**Abstrak**

Pembangunan saat ini tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga telah memasuki pelosok desa di setiap wilayah di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan merupakan sebuah tujuan penyelenggaraan pembangunan pedesaan yang tertuang dalam UU No. 6/2014. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. Untuk menciptakan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan, desa harus memiliki Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Kependudukan, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya sesuai kebutuhan desa. Dalam Pembangunan desa diperukan peran masyarakat dan juga pemerintah agar pembangunan desa dilaksanakan secara rata dan tepat.

Kata Kunci: Kualitas Hidup. Kesejahteraan, Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan desa tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan lancar, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada hubungannya dengan administrasi. Dengan demikian, pembangunan itu dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat untuk memperoleh hasil guna yang maksimal. Atas dasar latar belakang tersebut, pemerintah merasa perlu membuat suatu regulasi untuk mengatur administrasi pembangunan desa yang representatif dan akuntabel. Kepedulian pemerintah tersebut telah diwujudkan dalam sebuah regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada

awal kemerdekaan kita kenal “Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau Kasimo Welfare Plan. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. Kasimo Welfare Plan yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada peningkatan produksi pangan.

Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep community development. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangu-nan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

Masyarakat desa yang tengah mengalami proses perubahan perilaku, sikap dan cara berpikir. Perubahan ini antara lain terjadi karena dampak pembangunan melalui modernisasi desa,

yang ditandai dengan adanya perbaikan infrastruktur, masuknya sarana transportasi, elektrifikasi, sarana komunikasi, monetisasi dan komersialisasi (Latief, 2002: 77). Dengan kata lain kondisi pedesaan saat ini telah mengalami perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan non fisik.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian Peran Administrasi Terhadap Pembangunan Desa menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survei literatur akademik menggunakan cara daring (Suparman, 2021). Dalam metode penelitian ini peneliti mencari data menggunakan google scholar, lalu website mengenai kajian yang akan diteliti, kemudian website mengenai kajian jurnal, maupun media massa yang mempunyai keterkaitan dengan administrasi pembangunan dan juga pembangunan desa.

Metodologi penelitian ini bisa dikatakan efektif saat ini karena dalam mengumpulkan data dilakukan secara daring sebab adanya situasi yang harus membatasi interaksi yang dilaksanakan secara langsung ataupun tatap muka. Metode penelitian ini juga bisa dikatakan efisien karena tidak memerlukan banyak waktu untuk mengumpulkan data karena pada saat ini telah banyak informasi dan juga data yang diperlukan bisa diakses secara mudah melalui website terkait pada kajian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Administrasi

Administrasi di artikan dari Bahasa Belanda yaitu dari kata *administratie* memiliki arti tata usaha, model manajemen dari aktivitas organisasi, ataupun manajemen sumber daya. Jika disimpulkan dari pengertian bahasa Inggris dan Belanda pengertian administrasi secara sempit yaitu merupakan suatu kegiatan ketatausahaan. Dalam pekerjaan ketatausahaan dapat disimpulkan menjadi suatu kegiatan yang bersangkutan dengan catat mencatat maupun tulis-menulis, kemudian untuk menggandakan, menyimpan, maupun yang dikenal dengan

clerical work ini dikatakan oleh Silalahi pada tahun 2013.

Adapun administrasi jika diartikan secara luas yaitu menjadi sebuah Kerjasama, karena administrasi selalu berhubungan pada setiap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh manusia maupun sekelompok orang dan akan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. merupakan suatu kegiatan maupun usaha oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi juga bisa diartikan menjadi sebuah bagian dari pengelolaan pada perusahaan yang mencakup pendataan serta pengaturan mengenai hal-hal yang memiliki kaitan dengan berbagai aspek perusahaan supaya bisa dioptimalkan. Administrasi tidak asing karena aktivitas tersebut dilakukan oleh ahli yang disebut dengan administrator ataupun staf administrasi.

Administrasi secara umum merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas bisa juga di katakan menjadi bentuk usaha yang mempunyai keterkaitan pada macam-macam pengaturan kebijakan mencapai target terhadap organisasi, administrasi mempunyai peran yang sangat krusial untuk segala kegiatan yang ada di perusahaan ataupun organisasi. Administrasi memiliki peran sangat penting agar suatu perusahaan bisa tetap berdiri dan lebih berkembang. diantaranya yaitu:

- a) Administrasi menurut Herbert Simon yang mengartikan jika administrasi menjadi suatu aktivitas pada kelompok kerjasama agar bisa mencapai tujuan bersama.
- b) Administrasi menurut Sondang P. Siagian mengartikan jika administrasi merupakan suatu keseluruhan proses dari kerjasama antara dua orang manusia maupun lebih yang memiliki dasar pada rasionalitas tertentu agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- c) Administrasi menurut Dimock and Dimock mengartikan jika administrasi merupakan suatu ilmu yang mengajarkan tentang apa yang dikehendaki oleh masyarakat kat melalui pemerintah serta cara untuk memperolehnya.

B. Pengertian Pembangunan

pembangunan menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Koordinasi, suatu kegiatan perencanaan Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli mem-berikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

C. Pengertian Desa

Desa memiliki asal dari bahasa Sansekerta yang merupakan deca yang memiliki arti tanah air, tanah asal, maupun tanah kelahiran. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya yang memiliki dasar pada hak asal-usul serta adat istiadat yang sudah diakui pada pemerintahan nasional serta daerahnya

berada di kabupaten. Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 pada tahun 2005 mengenai desa pada pasal 1 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang memiliki dasar pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa pasal 1 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat memiliki dasar pada prakarsa masyarakat hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut beberapa ahli di antaranya yaitu:

- a) Sutardjo kartohadikusumo pada bukunya yang berjudul Desa pada tahun 1953 mengartikan jika desa menjadi suatu kesatuan hukum di mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa membuat pemerintahan sendiri.
- b) Bintarto yaitu seorang guru besar fakultas geografi Universitas Gajah Mada menerangkan pengertian desa pada bukunya yang berjudul Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya pada tahun 1989 mengartikan jika desa merupakan sebuah perwujudan geografis ataupun wilayah yang diadakan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi politik dan kultural pada hubungan serta pengaruh timbal baliknya dengan daerah lain di sekitarnya.

Dari pengertian desa diatas dapat disimpulkan jika desa merupakan suatu komunitas yang memiliki wewenang agar bisa mengatur daerahnya sendiri atau kepentingan masyarakatnya serasi dengan kondisi sosial budaya setempat atau dapat dikatakan jika desa mempunyai otonomi asli yang perlu mendapat

perhatian pada kerangka penyelenggaraan pemerintah khususnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Administrasi Pembangunan Desa

Administrasi desa mencakup seluruh pencatatan data maupun informasi yang terkait dengan pemerintahan desa. Administrasi desa melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya diputuskan lewat Keputusan Bupati. Kemudian, agar pengelolaan pemerintahan desa semakin meningkat, dibutuhkan penyempurnaan pelaksanaan administrasi. Namun Berikut ini adalah sejumlah definisi yang berhubungan dengan administrasi di pedesaan:

- 1) Administrasi umum: pencatatan data dan informasi yang menyangkut pemerintahan desa;
- 2) Administrasi penduduk: pencatatan data dan informasi yang menyangkut kependudukan;
- 3) Administrasi keuangan: pencatatan data dan informasi yang menyangkut keuangan desa;
- 4) Administrasi pembangunan: pencatatan data dan informasi yang menyangkut pembangunan, baik yang akan, sedang, dan sudah diselenggarakan pemerintah desa.

Keempat jenis Administrasi tersebut dicatat dalam buku administrasi desa yang berbeda. pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama: (Tjokrowinoto, 2007: 36). Adapun ke 3(tiga) azas tersebut adalah:

- Pertama. azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

- Kedua. azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.
- Ketiga. azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedang putusan untuk melaksanakan proyek.

D. Peran Administrasi Dalam Pembangunan Desa

Dalam pembangunan desa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14. Sedangkan administrasi merupakan suatu hal yang sangat penting pada rangka untuk melakukan suatu aktivitas sebab tanpa adanya administrasi tujuan yang akan dicapai tidak akan berjalan dengan baik. Pada setiap kebijakan yang akuntabel kemudian tataran implementasinya harus menghitung administrasi dengan baik karena melaksanakan administrasi tersebut tidak jauh dengan manajemen.

Membangun desa menjadi suatu bagian pada pembangunan nasional. Kemudian keberhasilan dalam pembangunan desa juga menjadi suatu tolak ukur mengenai keberhasilan dalam menata desa itu sendiri. Masyarakat desa menjadi suatu objek dari pembangunan dilayani serta diikutsertakan pada saat pembangunan. Dengan memberikan hak pengertian mengenai administrasi terhadap masyarakat diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai prestasi.

Administrasi pembangunan Indonesia harus dilakukan dengan baik serta lancer, yang dilakukan memiliki hubungan dengan administrasi, pembangunan itu dapat lebih berdaya guna untuk masyarakat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dari penjelasan di atas pemerintah dirasa perlu untuk membuat inovasi agar bisa mengatur

pembangunan desa yang lebih representatif serta akuntabel. Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu isu strategis untuk mewujudkan transparan, akuntabel, dan adil. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berhasil dengan baik. Keterlibatan masyarakat semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar mereka dapat ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bintoro menyatakan bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut:

- 1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
- 2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain;
- 3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu. Perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing. Seperti halnya tahapan kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam

penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan pendapat. Seperti halnya yang dikatakan Huraerah (dalam Laksana, 2013: 61), bahwa dalam pembangunan masyarakat bisa berperan untuk menyumbangkan pemikiran. Contohnya, di satu pihak memandang Pivonisasi lebih mendesak untuk dilaksanakan, sementara di pihak lain menganggap normalisasi saluran air bersih yang lebih penting. Akibatnya perdebatan terjadi, semua pihak merasa mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam kerangka membangun pembaharuan bagi desa. Salah satu factor utama dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak kepada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Membangun partisipatif efektif masyarakat sudah tentu akan lebih memperkuat kapasitas yang dimiliki suatu desa. Ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung tidak menyentuh kebutuhan pembangunan itu sendiri mendorong percepatan dan reformasi dalam aspek kehidupan terutama peran yang dimainkan secara proporsional oleh berbagai elemen masyarakat. Dalam membahas partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah, pemerintah perlu untuk mengetahui perkembangan di daerah, Peran pemerintah dalam pembangunan, tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat pada pembangunan desa yaitu melalui program gotong royong yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sesuai sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa.

Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat itu perlu adanya motivasi yang bersifat kekeluargaan, informasi yang terbuka kepada masyarakat serta memberikan keteladanan yang tampak dan dapat di rasakan

oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam pembangunan dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak berjalan dengan baik, pembangunan dapat membantu pengawasan sehingga pembangunan dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat.

Konsep partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada BAB VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Memperoleh pelayanan yang adil.
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengawasan pembangunan tidak hanya didasarkan atas kepentingan pemerintah Jika masyarakat ikut dan berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena dengan adanya pengawasan dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan.

E. Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Desa

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, upaya pemerintah saat ini adalah dengan mempercepat pembangunan desa mandiri dan sejahtera. Pembangunan sebuah perdesaan kerap kali disalah artikan seperti masyarakat desa diposisikan sebagai pihak pendukung pembangunan yang telah direncanakan dan dilakukan pemerintah tanpa dimintai pendapat. Pada kenyataannya pendapat masyarakat desa sangatlah penting dalam keberhasilan pembangunan desa, karena masyarakat desa itu sendiri yang mengerti

bagaimana kondisi dan segala sesuatu hal yang ada pada desanya.

Pemerintahan Desa merupakan bagian pondasi pemerintahan pusat dalam menerima data dan informasi untuk penentuan berbagai kebijakan pemerintahan secara nasional. Agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan (Sondakh et al., 2014).

Program dan kegiatan pembangunan desa yang disosialisasikan. Teknisnya dilakukan secara berjenjang dari dari pemerintah Pusat sampai pemerintah Desa. Pengendalian program dilaksanakan secara ketat mengikuti kaidah pelaksanaannya. meskipun sasarannya belum tentu sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat desa. Permasalahan pembangunan desa pandangan orang luar tentang desa. Bahwa ada kecenderungan selama ini desa dipandang sebagai suatu komunitas terbelakang, sehingga lebih banyak diperlakukan sebagai obyek pembangunan dari pada subyek pembangunan. Inovasi, kreativitas dan inisiatif masyarakat desa kurang mendapat ruang dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa diantaranya yaitu:

- a. Peran masyarakat yang mendukung proses kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa:
 - 1) Dalam perencanaan, masyarakat memberikan partisipasinya berupa kehadiran dalam pertemuan-pertemuan mulai dari tingkat RT hingga Musrenbang. hal ini memudahkan Pemerintah Desa untuk melakukan koordinasi maupun memberikan sosialisasi pembangunan.
 - 2) Peran masyarakat yang secara aktif memberikan masukan-masukan kepada

Pemerintah Desa yang oleh Huraerah (dalam Laksana: 2013:61) disebut sebagai partisipasi buah pikiran. Peran ini memudahkan Pemerintah Desa untuk mengambil keputusan karena Pemerintah Desa menjadi lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya.

- 3) Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat mempunyai berbagai inisiatif untuk memperlancar proses pembangunan. Inisiatif tersebut berupa pemberian makanan, membantu para tukang, hingga menyisihkan hartanya untuk menutupi kekurangan dana yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat melalui tim pelaksana pembangunan juga memahami bagaimana mengelola dana yang baik dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini memudahkan Pemerintah Desa memberikan arahan
- 4) pengawasan pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan baik fisik maupun non fisik .masih bersifat subordinate union of partnership, masyarakat membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui tim pengawas terhadap jalannya pembangunan.
- b. Faktor pendukung dari pihak Pemerintah Desa dalam kerjasama tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:
 - 1) Pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar warga. Pemerintah Desa menghadiri langsung pertemuan-pertemuan dari level RT.
 - 2) Pemerintah Desa melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan mengunjungi rumahnya. Pendekatan seperti ini membuat masyarakat lebih mudah menyadari arti penting kesamaan visi-misi demi kebaikan bersama.
 - 3) Dalam membuat peraturan, Pemerintah Desa memberikan fasilitas untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mentaati aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

- 4) Pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa memberikan porsi lebih banyak kepada masyarakat untuk berperan. Hal ini membuat masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan secara penuh. Dalam temuan disebutkan, dengan memberikan porsi yang lebih besar tersebut, masyarakat terdorong untuk melakukan pembangunan dengan sebaik-baiknya karena merasa dimanusiakan. Dorongan seperti ini dalam teori organisasi disebut pemberian reward and punishment untuk memotivasi anggota organisasi. Motivasi berupa penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian wewenang tersebut membuat masyarakat merasa dihargai oleh Pemerintah Desa.
- 5) Pendekatan pembangunan nonfisik dilakukan Pemerintah desa salah satunya dengan kebudayaan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan masyarakat

PENUTUP

Kesimpulan

Administrasi menjadi suatu kegiatan maupun aktivitas yang memungkinkan untuk menjadi bentuk usaha yang memiliki keterkaitan terhadap macam-macam pengaturan kebijakan yang mempunyai tujuan agar bisa mencapai target kerja terhadap organisasi atau instansi. Oleh karena itu administrasi memiliki peran yang sangat krusial untuk segala kegiatan yang ada di organisasi. Administrasi mempunyai peran sangat penting supaya suatu organisasi bisa tetap berdiri dan juga menjadi lebih berkembang. Pada pelaksanaan praktik administrasi desa mencakup seluruh pencatatan data maupun informasi yang terkait dengan pemerintahan desa. Kemudian juga dalam pembangunan desa yaitu suatu upaya agar bisa meningkatkan kualitas hidup kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Dalam pembangunan desa administrasi memiliki peranan penting karena tanpa adanya administrasi maka tujuan yang akan dicapai atau yang sudah ditentukan tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan desa menjadi suatu bagian dalam pembangunan nasional maka dari

itu keberhasilan dalam membangun desa menjadi satu tolak ukur mengenai keberhasilan dalam menata desa itu sendiri dan juga dalam pembangunan nasional.

Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah penghasil dengan baik. Adanya keterlibatan masyarakat yang semakin aktif ataupun tinggi Maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat juga memiliki peran penting agar bisa mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika partisipasi masyarakat kurang dalam membangun bisa membuat pembangunan tidak berjalan dengan baik karena masyarakat yang ikut aktif pada saat pembangunan desa bisa membantu Pengawasan Pembangunan sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Peran pemerintah juga penting dalam pembangunan karena menjadi aparat pemerintah harus merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang telah ditentukan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan sebab sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan.

saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yaitu:

- 1) Dalam pembangunan desa partisipasi masyarakat lebih di aktifkan lagi sebab bisa mempermudah serta juga mendukung untuk melaksanakan program pembangunan desa.
- 2) Merencanakan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan administrasi supaya perencanaan bisa mencapai tujuan dan juga mensejahterakan masyarakat desa.
- 3) Dalam mensejahterakan masyarakat juga bisa dimulai dari masyarakat itu sendiri dengan menaati peraturan perundang-undangan pada tingkat Pusat, Provinsi, kemudian daerah maupun dalam tingkat RT dan RW karena hal

tersebut merupakan suatu kebijakan agar bisa buat peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- [2] *Pengertian Administrasi: Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Cara Kerjanya*. (n.d.). Idcloudhost.Com. <https://idcloudhost.com/pengertian-administrasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-cara-kerjanya/>
- [3] *Kerja Sama: Pengertian, Bentuk dan Faktor Pendorong*. (n.d.). Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/070000869/kerja-sama-pengertian-bentuk-dan-faktor-pendorong>
- [4] Hantoro, N. M. (2013). *PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KETURAHAN DALAM SISTEM KETATAN EGARAAN*. *Kajian*(18), 4.
- [5] *Desa: Definisi dan Unsurnya*. (n.d.). Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>
- [6] Effendi, B. (2002). *Hal Utama dalam Pembangunan*. Andi offset.
- [7] Gemantar-wonogiri. (n.d.). *Mengapa Desa Perlu Administrasi Pembangunan?* Gemantar.Desas.Id. [http://gemantar.desa.id/arsip/1949#:~:text=Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan,Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa.](http://gemantar.desa.id/arsip/1949#:~:text=Administrasi%20pembangunan%20adalah%20kegiatan%20pencatatan,Buku%20Rencana%20Kerja%20Pembangunan%20Desa.)
- [8] Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tolumbukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Utara. (2017). *Jurnal Administrasi Publik Unsrat, Vol 3 No 0*.

-
- [9] *Pengertian Desa, Otonomi dan Wewenang*. (2007). Pustaka Borneo. <http://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pengertian-desa-otonomi-dan-wewenang.html#gsc.tab=0>
- [10] Laksana, N. S. (2013). *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa*.
- [11] Selatan, P., & Poso, K. (2015). *Jurnal Administratie*. 01.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN